



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAZER AKBAR
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 683821

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.170.000.000

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 598 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah Seluas 14257 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
7. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
8. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA DOMPU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 75.000.000

1. MOBIL, TOYOTA/ (352) KIJANG INNOVA E DIESEL INNOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 12.432.548



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.257.432.548
III. HUTANG	Rp.	186.494.989
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.070.937.559

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.